

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN
SASARAN ANGGARAN, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
(Studi Empiris pada Dinas dan Badan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Disusun Oleh:

**PURWITA RISDIANA
B 200 140 365**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN
SASARAN ANGGARAN, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
(Studi Empiris pada Dinas dan Badan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

PURWITA RISDIANA

B 200 140 365

Telah diperiksa dan disetujui oleh

Dosen Pembimbing



Dra. Nursiam, M.H. Akt., CA.

NIK. 524/0624096401

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN
SASARAN ANGGARAN, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
(Studi Empiris pada Dinas dan Badan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo)**

Yang ditulis oleh

PURWITA RISDIANA




B 200140365

Telah diperiksa di depan Dewan Pengujian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Kamis, 05 April 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Dra. Nursiam, M.H. Akt., CA. ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Erma Setiawati, M. M., Akt. ()
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Drs. M. Abdul Aris, M. Si. ()
(Anggota 2 Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Syamsudin, MM

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat pernah tertulis orang lain kecuali secara tertulis diacu pada naskah dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila terbukti ketidakbenaran dalam penyertaan diatas maka saya akan bertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 5 April 2018

Penulis



(Purwita Risdiana)

B200140365

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

(Studi Empiris pada Dinas dan Badan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo)

Abstark

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Purworejo. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Purworejo. Populasi penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah yang menduduki jabatan eselon II, III, dan IV di kabupaten Purworejo. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 55 responden. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Purworejo, sedangkan kejelasan sasaran anggaran dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Purworejo.

Kata Kunci: kinerja pemerintah daerah, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, budaya organisasi

Abstract

The purposes of this research is to analyze the participation of budget preparation, budget goal clarity, and organizational culture to the performance of local government officials in Purworejo City Government. This research was conducted at the office of government official who work in purworejo district. The population of this research is the local government apparatus occupying the position of Eselon II, III, and IV in purworejo district. The technique of determination of the sample used in this research is purposive sampling which amounted to 55 respondent. The analysis technique used multiple linear regression using SPSS version 20.0. The results show that budgetary participation have is not influence positive on the performance of local government officials. Budget goal clarity and organizational culture has influence on performance of local government officials.

Keywords: *performance government officials, participation of budget preparation, budget goal clarity, and organizational culture*

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien (LKjIP Kabupaten Purworejo tahun 2016). Prinsip-prinsip penyelenggaran pemerintah demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang melandasi keberhasilan pencapaian kinerja.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purworejo (LKjIP Kabupaten Purworejo) adanya beberapa faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah faktor internal yang meliputi penyusunan program yang mendukung kinerja kurang optimal pelaksanaannya karena sebagian besar didukung kegiatan-kegiatan yang bersifat rutinitas dan kurang fokus. Selain itu terdapat faktor lain yang menyebabkan kinerja pemerintah daerah masih rendah diantaranya karena sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan atau penatausahaan APBD, pertanggung jawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD serta pengawasan (Nurhalimah, et al. 2013).

Tujuan suatu organisasi pada umumnya diturunkan dari perencanaan strategis, yaitu: dimulai dari visi, misi, falsafah dan kebijakan (Mardiasmo, 2006: 195). Perencanaan strategik harus didukung dengan budaya organisasi yang kuat dan dengan diikuti perubahan atau perilaku anggota organisasi untuk melaksanakan program-program yang efektif dan efisien. Perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah tentu selalu disertai dengan tujuan. Tujuan tersebut diturunkan kedalam bentuk yang lebih jelas yaitu berupa sasaran dan dalam implmentasinya sasaran dilakukan pemantauan terhadap aktivitas yang berlangsung.

Faktor-faktor ketidaksinkronan antara proses perencanaan dan proses penganggaran keuangan daerah di antaranya adalah adanya faktor ego sektoral dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, sistem perencanaan dan penganggaran dari awal tidak disusun secara komprhenesif sehingga *output* masing-masing dokumen perencanaan dan penggaran tidak terkait satu dengan yang lainnya, kurangnya koordinasi berbagai pihak terkait penyusunan komponen perencanaan dan penganggaran, kurang tepatnya proyeksi perimbangan

pendapatan dan belanja daerah, dan adanya morzal *hazard* (Rahajeng, 2016: 71). Berdasarkan hal tersebut maka partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan budaya organisasi lebih perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah setempat karena adanya ketidakjelasan proses anggaran antar program dan kebiasaan-kebiasaan dalam organisasi yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan.

Menurut hasil penelitian Defitri (2017) semakin tingginya partisipasi dalam penyusunan anggaran akan menghasilkan informasi yang efektif antara atasan dengan bawahan, sehingga komunikasi antara atasan dan bawahan dapat berjalan lancar dan dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, aparat pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam perealisasiannya yang secara tidak langsung ini akan mempengaruhi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 pasal 8 anggaran APBD yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi atau input yang ditetapkan.

Penelitian mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap pemerintah daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya yaitu: Nurhalimah, et al (2016) bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyawan dan Nazaruddin (2012) bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Sedangkan penelitian mengenai kejelasan sasaran anggaran telah dilakukan oleh Hasil Deftri (2017) dmenyebutkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja aparat pemerintah daerah. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhalimah (2013) dengan hasil kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Sedangkan penelitian mengenai Budaya Organisasi telah di teliti oleh Fauziah (2016) bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Purworejo.

1.1 Kajian literatur

1.1.1 *Stewardship Theory*

Teori *swetardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Fauziah, 2016). Dalam sektor publik teori ini berarti menggambarkan situasi dimana para aparatur tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk publik.

1.1.2. Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja Aparat Pemerintah Daerah adalah seperangkat hasil yang dicapai oleh aparat pemerintah daerah dan suatu sistem yang bertujuan menilai pencapaian suatu startegi melalui alat ukur finansial dan non finansial (Defitri, 2017). Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak (*milestone*) yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan (Mahmudi, 2010: 10).

1.1.3. Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi Anggaran diartikan sebagai proses keikutsertaan manajer pusat pertanggungjawaban dalam menyusun anggaran dan mempengaruhi target anggaran sebagai bagian utama atas tanggung jawabnya (Matodang, et al. 2015). Dalam organisasi publik khususnya pada pemerintahan daerah, makna partisipasi adalah pelibatan SKPD dalam penyusunan anggaran daerah (APBD). Kepala SKPD (Sekretariat, dinas, badan, kantor, inspektorat, dan satuan polisi pamongpraja) merupakan pengguna anggaran atau pengguna barang yang diberi kesempatan untuk mengajukan usulan terkait dengan pelaksanaan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) SKPD yang dipimpinnya (Abdullah, et al. 2013).

1.1.4. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran dipahami oleh orang bertanggungjawab atas anggaran tersebut (Wahyuni, et al. 2014). Pada konteks pemerintah daerah, sasaran atau juga yang disebut dengan target,

merupakan hasil yang diinginkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan (Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal ayat 43).

1.1.5. Budaya Organisasi

Budaya Organisasi diasumsikan sebagai sebuah corak dari asumsi-asumsi dasar, yang ditemukan atau dikembangkan oleh sebuah kelompok tertentu untuk belajar mengatasi problem-problem kelompok dari adaptasi eksternal dan integrasi internal, yang telah bekerja dengan baik, budaya organisasi juga dapat diidefinisikan sebagai sebuah persepsi umum yang dipegang teguh oleh anggota organisasi dan menjadi sebuah sistem yang memiliki kebersamaan pengertian (Muchlas, 2008: 534-535). Dalam organisasi sektor publik, ikatan batin antara anggota dengan organisasi dapat dibangun dari kesamaan misi, visi, dan tujuan organisasi, bukan sekedar ikatan kerja (Mahmudi, 2010: 23).

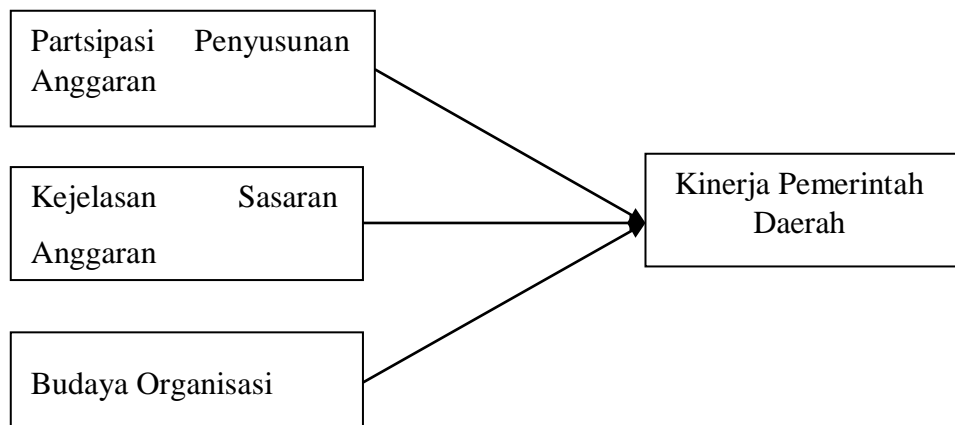
1.2 Pengembangan hipotesis

H1: Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah

H2: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

H3: Budaya Organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

1.3 Kerangka Pemikiran Teoritis



2. METODE

2.1 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat pemerintah daerah Eselon II, eselon III, dan eselon IV di Kabupaten Purworejo. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012: 62). Sampel dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah yaitu Kepala Dinas dan Badan, kepala bagian perencanaan, dan kepala sub bagian keuangan di Dinas dan Badan yang berjumlah 21 kantor di Kabupaten Purworejo. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008: 193). Data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden yaitu aparat pemerintah daerah yang bekerja pada Dinas dan Badan di Kabupaten Purworejo.

2.2. Definisi Operasional dan Pengukurannya

2.2.1. Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi (Mahsun, 2006: 25). Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mendefinisikan kinerja sebagai keluaran atau hasil kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Indikator kinerja aparat pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan oleh (Pratama, 2012) dan (Duvamindra, 2015) yang terdiri dari:

- a. Kualitas, kuantitas, pengetahuan umum
- b. Kreativitas, inisiatif, kepercayaan
- c. Kualitas personal

Indikator-indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin mulai dari: dengan (1) “Sangat Tidak Setuju (STS)”, (2) “Tidak Setuju (TS)”, (3) “Netral (N)”, (4) “Setuju (S)”, (5) “Sangat Setuju (SS)”.

2.2.2. Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi anggaran yaitu tingkat pengaruh dan keterlibatan yang dirasakan oleh individu dalam proses perencanaan anggaran (Milani, 1975). Partisipasi anggaran umumnya dinilai sebagai pendekatan manajerial yang dapat meningkatkan organisasi (Matondang, 2015). Dimensi atau indikator yang partisipasi penyusunan anggaran yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan oleh (Kartika, 2010) dan (Duvamindra, 2015) yang terdiri dari: keterlibatan aparat pemerintah dalam penyusunan anggaran, merevisi anggaran, usulan tentang anggaran, banyaknya input, memandang kontribusi atau pendapat dalam penyusunan anggaran. Indikator-indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin mulai dari: (1) “Sangat Tidak Setuju (STS)”, (2) “Tidak Setuju (TS)”, (3) “Netral (N)”, (4) “Setuju (S)”, (5) “Sangat Setuju (SS)”.

2.2.3. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan dengan jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut (Wahyuni, et al. 2014). Indikator kejelasan sasaran anggaran yang digunakan dalam penelitian dikembangkan oleh (Kenis, 1979) dan digunakan oleh Munawar (2006) dan Istiyani (2009) yaitu: Pengetahuan terkait tujuan (RKA-SKPD), Kesadaran akan pentingnya tujuan rencana kerja anggaran, ketidakjelasan tujuan rencana kerja anggaran, dan penyesuaian rencana kerja anggaran dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Indikator-indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin mulai dari: (1) “Sangat Tidak Setuju (STS)”, (2) “Tidak Setuju (TS)”, (3) “Netral (N)”, (4) “Setuju (S)”, (5) “Sangat Setuju (SS)”.

2.2.4. Budaya Organisasi

Budaya Organisasi adalah sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara

berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat, dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, sehingga secara langsung memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi (Wirnipin, et al., 2015).). Indikator budaya organisasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Fauziah (2016) yang terdiri dari dukungan intansi menyediakan perlatan kerja sesuai kebutuhan pekerjaan, kesempatan mengemukakan pendapat, hubungan antar aparatur pemerintah daerah, hubungan dengan atasan, keterlibatan antar anggota instansi dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan aparat pemrintah daerah terkait SOP, stategi dari pemimpin untuk tujuan dan kemajuan instansi.

Indikator-indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin mulai dari: (1) “Sangat Tidak Setuju (STS)”, (2) “Tidak Setuju (TS)”, (3) “Netral (N)”, (4) “Setuju (S)”, (5) “Sangat Setuju (SS)”.

2.3. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah :

$$KPD = \alpha + \beta_1 PPA + \beta_2 KSA + \beta_3 BO + \varepsilon$$

Keterangan :

KPD = Kinerja Pemerintah Daerah

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

PPA = Partisipasi Penyusunan Anggaran

KSA = Kejelasan Sasaran Anggaran

BO = Budaya Organisasi

ε = error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis meunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah karena nilai signifikansi varaibel partisipasi penyusunan anggaran (PPA) nilai t_{hitung} lebih kecildari t_{tabel}

(0,791 < 2,008) dan dapat dilihat nilai signifikansi variabel partisipasi penyusunan anggaran $0,432 > \alpha = 0,05$ sehingga hipotesis yang menyebutkan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah ditolak atau tidak diterima.

Penelitian ini menolak H_1 yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam hal ini berarti partisipasi penyusunan anggaran pemerintah daerah dalam pembuatan tujuan anggaran mungkin menurun, maka kinerja aparat pemerintah daerahpun juga akan menurun. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan dirancang dan disetujui, maka aparat pemerintah daerah akan menginternalisasi tujuan yang ditetapkan dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena mereka ikut terlibat dalam penyusunan anggaran. Selain itu adanya penyusunan program yang mendukung kinerja kurang optimal pelaksanaannya karena sebagian besar di dukung program kerja harian sehingga tidak terfokus pada yang lain, hal ini sesuai dengan LKjIP Kabupaten Purworejo. Partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, dikarenakan dalam mendapatkan, merencanakan, dan mengelola anggaran sudah ditetapkan standar jumlahnya sesuai peraturan pemerintah daerah sehingga tidak berdasarkan *reward* maupun pemberian bonus, sehingga aparat pemerintah daerah tidak terpacu untuk berpartisipasi secara aktif dan secara sepenuh hati untuk meningkatkan kinerja mereka (Fitri, 2016).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nazaruddin dan Henry (2012) dan Fitri (2016) bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilowati (2016) dan Nurhalimah, et al (2016) bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

3.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Variabel kejelasan sasaran

anggaran diketahui nilai t_{hitung} (4,543) lebih besar daripada t_{tabel} (2,008) dan nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$, sehingga hipotesis yang menyebutkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah diterima.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, aparat pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam perelasasiannya maka hal ini akan mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah. Dengan adanya suatu kejelasan sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah untuk pelaksanaan dalam satau pekerjaan di dalam kinerja aparat pemerintah daerah (Susilowati, 2016). Kejelasan sasaran anggaran menyebabkan aparat pemerintah daerah semakin mengerti target-target yang akan dicapai dimasa datang sehingga dapat meningkatkan kinerja. Anggaran yang tidak diketahui sasarannya akan mengakibatkan tidak sesuainya kegunaan dari anggaran yang semula direncanakan. Sasaran anggaran daerah harus bisa menjadi tolok ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan penganggaran daerah dapat menggambarkan sasaran kinerja yang jelas (Emilia, et al, 2013).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2015) dan Defitri (2017) bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhalimah, et al (2013) bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

3.3. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Variabel Budaya Organisasi diketahui nilai t_{hitung} (4,541) lebih besar daripada t_{tabel} (2,008) dan dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$. Sehingga hipotesis yang menyatakan budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah diterima.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi dalam organisasi pemerintah daerah memberi arti bahwa dengan budaya organisasi yang kuat akan memicu aparat pemerintah daerah untuk berfikir, berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai organisasi yang rertanam dalam

organisasi tersebut. Kesesuaian budaya yang terbentuk dalam diri setiap anggota organisasi dapat mendorong untuk meningkatkan kinerja organisasi di pemerintah daerah, selain itu anggota dalam organisasi haruslah mendukung dan aktif sehingga akan terjadi umpan balik yang akan berdampak pada kinerja yang baik. Budaya organisasi merupakan budaya yang dapat mendukung strategi dan dapat menjawab atau mengatasi tantangan lingkungan dengan cepat dan tepat, dengan adanya budaya organisasi tersebut para aparatur pemerintah daerah memiliki norma-norma, acuan, dan pedoman yang harus dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah meningkat (Fauziah, 2016).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, et al (2016) dan Hidayat, et al (2014) bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah, et al (2014) bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

4. PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Variabel budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

4.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini tentunya terdapat keterbatasan yang dialami oleh peneliti, namun diharapkan keterbatasan ini tidak mengurangi manfaat yang hendak dicapai. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuesioner saja.

2. Penelitian ini menggunakan populasi dan sampel yaitu dinas dan badan yang berada di Kabupaten Purworejo saja, sehingga hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pemerintah daerah di Kabupaten Purworejo.
3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan budaya organisasi untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Purworejo, sebetulnya masih ada faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.3 Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh serta adanya keterbatasan dalam penelitian, sehingga saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperoleh data sebaiknya dilakukan wawancara secara langsung kepada responden, supaya memberikan data yang lebih lengkap dan sesuai dengan harapan.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas sampel penelitian misalnya dengan menambah kabupaten atau kota yang lainnya.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel lain yang juga dapat menjelaskan kinerja pemerintah daerah seperti sistem pengendalian internal pemerintah, transparansi, dan perilaku organisasi lainnya dalam organisasi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti., Karmizi., & Enni Savitri. 2014. "Pengaruh Good Governance, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)". *Jurnal JOM FEKON Fakultas Ekonomi Universitas Riau*. Vol. 1 No. 2
- Defitri, Siska Yulia. 2017. "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah". *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*. E-ISSN: 2527-9483. Vol. 6 No.2. h:108-118.
- Duvamindra, Ginanjar Yudha. 2015. "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dengan Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating". *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.

- Emilia, Rahmi Nur., Willy Abdillah., & Abdullah. 2013. “Pengaruh Partisipasi dalam Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Serta Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Bengkulu)”. *Jurnal Fairness*. ISSN 2303-0348. Vol. 3 No. 3. h: 42- 53..
- Fauziah, Shifa. 2016. “Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Motivasi, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*. h:1-18..
- Fitri, Tengku Ramona. 2016. “Pengaruh Budgetary Goal Characteristics, Kompensasi Terhadap Kinerja Parat Pemda Dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Dinas-dinas Kabupaten Rokan Hilir”. *JOM FEKON*. Vol. 3 No. 1. h: 520-534..
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Istiyani. Istiyani. 2009. “Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Temanggung (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Temanggung)”. *Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret*.
- Halim, Abdul. 2007. “Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah”. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- <http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id/> (diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 21.00).
- Jogiyanto. (2009). Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta : BPFE
- Kenis, I. (1979). “*Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance*”, *The Accounting Review*. 54(4), pp. 707– 721.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2015.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016.
- Luthans, Fred. 2006. Perilaku organisasi. Edisi 10. Yogyakarta : Andi
- Mahmud, Mohammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Matondang, Nova Idea., Hasan Basri., & Muhammad Arfan. 2015. “Pengaruh Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara”. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. ISSN: 2302-0164. Vol. 4 No.4. h:36-45..
- Milani, K.W. (1975). “*The Relationship of Participation in Budget-Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes: a Field Study*”, *The Accounting Review*, 50(2), pp. 274–284
- Muchlas, Makmuri. 2008. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazarudiin, Ietje., & Henri Setyawan. 2012. “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Motivasi, Desentralisasi, Dan Job Relevant Information Sebagai Variabel Moderasi”. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Volume. 12 Nomor. 2, h: 197-207.
- Nurhalimah., Darwanis., & Syukriy Abdullah. 2013. “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah di Pemerintah Aceh”. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. ISSN: 2303-0164. Vol.2 No.1. h: 27-36..
- Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah .
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rahajeng, Anggi. 2016. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Method For Business: A Skill Building Approach*. New York: John Wileyand Sons, Inc.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. ALFABETA, CV.

- Susilowati, Ning Umbar. 2016. "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas, Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (SKPD Kabupaten Kampar)". *Jurnal JOM FEKON Fakultas Ekonomi Universitas Riau*. Vol 3 No. 1.
- Verbeeten, Utrecht. H. M. 2008. "*Performance Management Practicies in Publik Sector Organization: Impact on Performance*". *Acoounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol. 21 No. 3. pp: 427-254..
- Wahyuni, Endang Sri., Taefani Taufik., & Vince Ratnawati. 2016. "Pengaruh Budaya Organisasi, *Locus Of Control*, Stres Kerja Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)". *Jurnal Manajemen*. Vol. 20, No.02. h: 189-206..
- Wahyuni, Rizka., M. Rasuli., & Volta Diyanto., 2014. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru). *JOM FEKON*. Vol. 1 No. 2..
- Wardani, Alfian Septa., & Dwi Sudaryanto. 2015. "Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 16 No. 1. ISSN: 1693-0908..
- Wirnipin, Komang Sri., I Made Pradana Adiputra., & Gede Adi Yuniarta. 2015. "Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng". *E-Jurnal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansu Program SI*. Vol. 3 No. 1..
- Wulandari, Nivo. 2013. "Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empris pada Satran Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Naskah Publikasi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*. h:1-18..